

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting adalah kondisi kegagalan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi kronis yang terjadi dalam jangka panjang, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (Mitra, 2015). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya (Tentama, Delfores, Wicaksono, & Fatonah, 2018). *Stunting* merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, kematian, serta menghambat perkembangan fisik dan mental anak (Sunarti, 2012).

Masalah *Stunting* pada anak balita dapat menghambat proses tumbuh kembang mereka dan menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti penurunan tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit tidak menular, menurunnya produktivitas, meningkatnya risiko kemiskinan, serta kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Unicef, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa balita yang mengalami *Stunting* memiliki kemungkinan besar untuk memiliki kemampuan kognitif yang rendah, serta mengalami kesulitan dalam prestasi akademik dan perkembangan psikososial (Diaz GM, Alandia-Román CC, Tonani R, Contente MMMG, Vicente SA de F, 2015).

Stunting juga berdampak jangka panjang yang bisa berlangsung seumur hidup bahkan memengaruhi generasi selanjutnya (Unicef, WHO, 2020). Dalam jangka pendek, *Stunting* dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan,

rendahnya kecerdasan, serta terganggunya metabolisme tubuh. Sementara itu, dalam jangka panjang, *Stunting* dapat mengakibatkan penurunan fungsi kognitif, prestasi belajar yang buruk, serta sistem imun yang lemah, sehingga anak menjadi lebih mudah sakit (Demsia Simbolon, 2019).

Salah satu penyebab utama *Stunting* adalah kurangnya asupan gizi selama masa kehamilan. Status gizi ibu hamil berperan penting dalam menentukan kondisi kesehatan. dampak lain yang turut memengaruhi *stunting* yaitu pemberian ASI. Anak yang tidak memperoleh ASI selama enam bulann pertama kehidupannya memiliki risiko tinggi mengalami *Stunting* (Fikadu, Assegid dan Dube, 2014).

Menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah dengan angka prevalensi *Stunting* tertinggi di Indonesia, bersama dengan provinsi Sulawesi Barat dan Papua (Kemenkes.go.id 2023). Berikut adalah data angka *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur per kabupaten/kota untuk tahun 2022 dan 2023:

Tabel 1.1 Prevalensi Stunting Provinsi NTT

No	Kabupaten Kota	Persentase <i>Stunting</i>	
		2022	2023
1	Sumba Barat	23,3	16,
2	Sumba Timur	14,9	13,3
3	Kupang	19,9	16,2
4	Timor Tengah Selatan	28,3	24,1
5	Timor Tengah Utara	24,4	24,3
6	Belu	13,7	11,9
7	Alor	11,7	11,1
8	Lembata	16,0	11,5
9	Flores Timur	18,7	19,4
10	Sikka	13,8	13,0
11	Ende	8,9	7,1
12	Ngada	9,3	8,7
13	Manggarai	16,2	14,3
14	Rote Ndao	22,3	21,7
15	Manggarai Barat	15,9	9,0
16	Sumba Tengah	8,7	7,7
17	Sumba Barat Daya	24,3	24,0
18	Nagekeo	8,4	8,2
19	Manggarai Timur	9,6	9,2
20	Sabu Raijua	18,1	17,1
21	Malaka	15,9	15,1
22	Kota Kupang	21,5	19,0
Jumlah		17,7	15,2

Sumber: <https://ntt.bps.go.id/indicator/30/1489/1/jumlah-balita-Stunting-menurut-kabupaten>

Berdasarkan data di atas Provinsi Nusa Tenggara Timur masih mengalami *Stunting*. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa angka prevalensi *Stunting* di Provinsi Nusa Timur masih cukup tinggi. Ada beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara timur dengan prevalensi *Stunting* nya masih tinggi pada tahun 2023 yaitu; Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) 24,3%, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 24,1%, Kabupaten Sumba Barat Daya 24,0% dan Kabupaten Rote Ndao 21,7% ini merupakan Kabupaten yang masih tinggi angka *Stunting*nya. Prevalensi *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 mencapai 17,7%, dan pada Tahun 2023 mencapai 15,2%,

prevalensi *Stunting* di NTT mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (KEMENKO PMK 2023).

Pencegahan *Stunting* menjadi hal yang krusial untuk memastikan generasi muda Indonesia dapat tumbuh secara optimal dan berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan nasional. Menyadari pentingnya isu ini, pada tahun 2021, pemerintah menetapkan PP No 72 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting*. Dalam regulasi tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan mandat kepada BKKBN untuk memimpin Upaya percepatan pengurangan prevalensi *stunting* yang dilakukan di Indonesia. Mandat ini kemudian dijabarkan lebih lanjut RAN PASTI diatur melalui Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021, bertujuan mempercepat mengatasi *stunting* di Indonesia.

Melalui peraturan ini, disusunlah rencana aksi nasional yang berfokus pada pendekatan keluarga berisiko *Stunting* serta pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar sektor guna mewujudkan target penurunan prevalensi *Stunting* menjadi 14%. Dalam rangka mendukung pencapaian target ini, BKKBN menjalankan Program kerja yang disinergikan dengan rencana aksi nasional tersebut.

Sebagai pelaksana utama, BKKBN memiliki peran penting dan strategis dalam penanganan *Stunting* di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya bertugas mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga termasuk aspek kesehatan dan gizi. Peran BKKBN sebagai koordinator dalam upaya penanganan *Stunting* mencerminkan

tanggung jawabnya dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan bangsa *Stunting*:

1 Pengintegrasian Program

BKKBN berperan dalam mengintegrasikan berbagai program dan regulasi atau langkah strategis yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan bagi ibu serta anak, gizi, dan kesejahteraan keluarga. Dengan mengkoordinasikan antara berbagai instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, BKKBN memastikan bahwa intervensi terhadap *stunting* tidak berjalan secara terpisah-pisah tetapi saling mendukung.

2 Pengumpulan dan Penyebaran Data

BKKBN bertanggung jawab dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan kependudukan dan kesehatan keluarga. Data ini digunakan untuk memetakan masalah *Stunting* secara akurat dan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran. Selain itu, BKKBN juga menyebarluaskan informasi dan hasil penelitian mengenai *Stunting* kepada pihak-pihak terkait, membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

3 Pendidikan dan Penyuluhan

Melalui berbagai program penyuluhan dan edukasi, BKKBN meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang cukup untuk anak dan ibu hamil. Program-program ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dan mengedukasi mereka mengenai cara pencegahan

Stunting melalui pola makan sehat, perawatan kesehatan, dan praktik pengasuhan yang baik.

4 Penguatan Kapasitas

BKKBN berperan dalam memperkuat kapasitas lembaga dan tenaga kesehatan di tingkat daerah dalam menangani masalah *Stunting*. Ini meliputi pelatihan, penyediaan alat, dan dukungan teknis untuk memastikan bahwa intervensi di lapangan dilakukan dengan standar yang tinggi.

5 Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan efektivitas program, BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi *Stunting*. Proses ini melibatkan penilaian berkala terhadap dampak program serta penyesuaian kebijakan dan strategi berdasarkan hasil evaluasi.

6 Penggalangan Kerja Sama

BKKBN juga aktif dalam menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ini mencakup kerjasama dengan kementerian terkait, lembaga internasional, dan komunitas lokal untuk menciptakan sinergi dalam upaya mengatasi *Stunting*.

Dalam konteks ini, BKKBN memegang peran sebagai koordinator yang vital dalam menyelaraskan berbagai upaya dan memastikan bahwa semua intervensi yang dilakukan berjalan secara sinergis dan efektif. Dengan peran strategis ini, BKKBN berkontribusi besar dalam upaya nasional untuk mengurangi prevalensi *Stunting* dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Maka dari hal di atas sangat dibutuhkan koordinasi dari BKKBN

dalam menyelaraskan pekerjaan dari semua pihak antara berbagai instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, atau stakeholder lain yang terlibat dalam mengatasi *Stunting* seperti Tenaga Kesehatan, Kader, dan masyarakat, agar dapat mengurangi angka *Stunting* sesuai target yang telah ditetapkan dan dapat secara efektif.

Berdasarkan data-data di atas dengan angka *Stunting* di Nusa Tenggara Timur yang masih cukup tinggi, dengan keterlibatan stakeholder dan mitra-mitra lain dari BKKBN dalam mengatasi *Stunting* dengan target yang disepakati berdasarkan aturan presiden No 72 Tahun 2021 dengan target penurunan menjadi 14%. Maka dari itu peneliti mengangkat judul **“PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENGATASI *STUNTING*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan isu-isu yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran koordinasi BKKBN dalam upaya mengatasi *Stunting*?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi BKKBN dalam menjalankan peran koordinasinya?
3. Bagaimana strategi BKKBN dalam mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi *Stunting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diurutkan di atas maka peneliti menyimpulkan beberapa pertanyaan seperti berikut ini:

1. Menganalisis efektivitas peran koordinasi BKKBN dalam upaya mengatasi *Stunting*
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BKKBN dalam menjalankan peran koordinasinya
3. Merumuskan strategi untuk mengoptimalkan peran koordinasi BKKBN dalam mengatasi *Stunting*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Bagi akademisi, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik terutama terkait dengan peran BKKBN sebagai koordinator dalam mengatasi *Stunting*.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan sumber informasi untuk mengkaji bidang atau topik yang sama demi pengembangan ilmu pengetahuan terkait Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dari sudut akademisi sebagai pembuat kebijakan khususnya berkaitan dengan Dinas BKKBN.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait dengan Peran BKKBN Sebagai Koordinator Dalam Mengatasi *Stunting* yang Ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur